

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu masalah yang sangat mendasar. Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat sehingga menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional, oleh karena itu manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan pangan (Irvansyah, 2021: 1301). Berdasarkan Undang-Undang No 7 RI Tahun 1996 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri karena disebabkan oleh kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang hadir ditengah-tengah masyarakat dan bahkan gejala kemiskinan meningkat sejalan dengan krisis yang masih di hadapi oleh bangsa Indonesia (Irvansyah, 2021: 1301).

Peran dari pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu bahwa upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut. Dalam rangka penanggulangan inilah, pemerintah telah merealisasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sangat beragam, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan ekonomi. Program-program ini belum sepenuhnya berhasil, namun telah menunjukkan sedikit perubahan. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2021 kemiskinan berada diangka 0,60%, pada bulan September 2021 kemiskinan berada diangka 0,17%, dan pada bulan Maret 2022 kemiskinan berada diangka 9,54%. Data ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah dalam mengatasi kemiskinan telah mengalami perubahan, namun belum signifikan.

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan sejak tahun 2017. Program Bantuan Pangan Non Tunai diatur dalam Peraturan Menteri

Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang menjelaskan bahwa dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, memberikan nutrisi yang lebih seimbang. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di E-warong yang bekerjasama dengan bank penyalur. Bantuan Sosial Non Tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai di berbagai Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Banyumas telah terlaksana. Berikut adalah data presentase penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2021.

Tabel I.1. Data Presentase Penerima BPNT Di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2021

No	Tahun	Presentase Penerima BPNT
1.	2020	31,59
2.	2021	40,52

Sumber 1: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Penerima BPNT pada Tahun 2020 Sebanyak 31,59%, dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 40,52%.

Program Bantuan Pangan Non Tunai juga tidak hanya lingkup Provinsi saja, tetapi bantuan BPNT ini sudah terlaksana di tiap desa yang ada di Indonesia, khususnya pada Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Berikut adalah tabel perbandingan masyarakat miskin dan penerima BPNT di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2022.

Tabel I.2. Perbandingan Masyarakat Miskin dan Penerima BPNT di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

No	Tahun	Masyarakat Miskin	Jumlah KPM
1.	2020	1.607	672
2.	2021	1.607	1013
3.	2022	3.069	699

Sumber 2 : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data di atas jumlah masyarakat miskin dari tahun 2020 ke tahun 2021 tetap sedangkan ke tahun 2022 mengalami kenaikan, tetapi jumlah KPM Program bantuan Pangan Non tunai justru menurun.

Dalam menentukan jumlah data KPM diperlukan data penduduk dari setiap desa. Berikut adalah rekapitulasi penduduk di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Tabel I.3. Rekapitulasi Penduduk Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

No	Kelompok	Jumlah Warga
1.	RW 1	1.705
2.	RW 2	1.028
3.	RW 3	1.300
4.	RW 4	1.273
JUMLAH TOTAL		5.305

Sumber 3 : Sekretaris Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas kelompok RW 1 sebanyak 1.705 warga, kelompok RW 2 sebanyak 1.208 warga, kelompok RW 3 sebanyak 1.300 warga, kelompok RW 4 sebanyak 1.273 warga, jumlah total sebanyak 5.305 warga.

Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kedungbanteng sudah terlaksana pada tiap RW. Berikut data Pembagian

Penerima BPNT tiap RW di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas:

Tabel I.4. Pembagian Penerima BPNT Tiap RW di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

No	RW	Masyarakat Miskin	Penerima BPNT	Presentase
1.	RW 1	1049	239 KPM	22,78
2.	RW 2	555	120 KPM	21,62
3.	RW 3	646	161 KPM	24,92
4.	RW 4	819	179 KPM	21,85

Sumber 4 : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat miskin yang paling tinggi berada di RW 1 sebanyak 1.409 warga, dengan penerima bantuan BPNT sebanyak 22,78%, sedangkan pada RW 3 masyarakat miskinnya sebanyak 646 warga akan tetapi penerima bantuan BPNT lebih tinggi dari RW lainnya yaitu sebanyak 24,92%.

Berdasarkan hasil pra-survei peneliti mendapatkan data tentang pembagian BPNT setiap bulannya di Desa Kedungbanteng pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel I.5. Data Ketepatan Waktu Penyaluran BPNT

Tahun	Bulan	Jumlah Penerima BPNT
2022	Januari	699
	Februari	-
	Maret	-
	April	681
	Mei	-
	Juni	699
	Juli	699
	Agustus	-
	September	681
	Oktober	599
	November	-
	Desember	-

Sumber 5 : Data E-warong Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penyaluran BPNT belum terlaksana setiap bulannya. Seperti pada bulan Februari sampai Maret dirangkap pada bulan April, pada bulan Mei dirangkap pada bulan Juni, dan pada bulan Agustus dirangkap menjadi bulan September, bulan November-Desember belum adanya penyaluran.

Setelah diadakan pra-survei oleh penulis bahwa pembagian bantuan program BPNT belum merata pada tiap RW yang ada di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dan belum tepat waktu penyaluran BPNT pada setiap bulannya. Dengan

demikian, adanya program BPNT tersebut ditunjukkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Efektivitas Program BPNT dapat dilihat setelah penulis turun ke lapangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas”.

B. Pembatasan Masalah

1. Dimensi Lokasi

Lokasi penelitian di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Dimensi Waktu

Penelitian dilakukan berdasarkan data tahun 2020-2022

3. Dimensi Studi

Dimensi studi dibatasi pada: Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

C. Perumusan Masalah

Sesuai dengan paparan yang dikemukakan dalam latar belakang, penelitian ini berupaya untuk mengetahui “Bagaimana Efektivitas Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang sejauh mana Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memperluas pemahaman dan mengembangkan Ilmu Sosial terutama Ilmu Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran/masukan bagi masyarakat luas pada umumnya dan pemerintah Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas pada khususnya dalam Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).